

BAB I

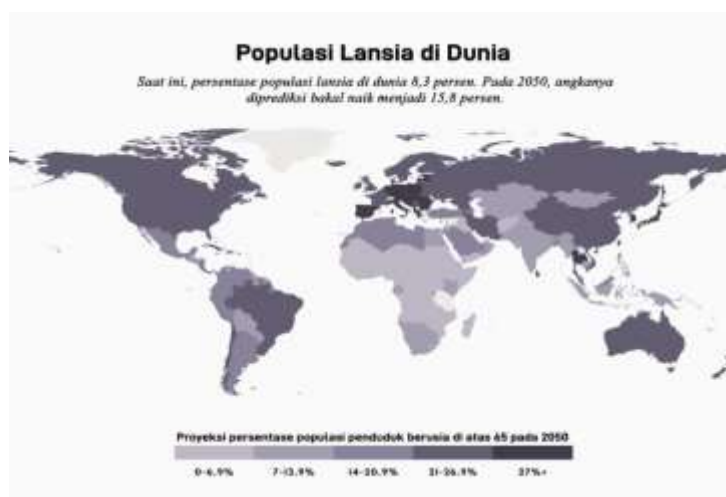
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lanjut usia merupakan seseorang dengan usia 60 tahun ke atas dan termasuk pada kelompok umur manusia yang telah memasuki tahapan akhir di masa kehidupannya (Raudhoh dan Pramudiani, 2021). Usia tersebut masuk dalam kategori kelompok rentan akan perubahan kondisi yang dialaminya. Hal ini menyebabkan para lansia masuk dalam kategori penyandang masalah kesejahteraan sosial yang mana masa kehidupan para lansia mempengaruhi berapa aspek kehidupannya yakni aspek biologis, sosial, dan ekonomi. Pada aspek biologis berkaitan dengan proses penurunan daya tahan fisik lansia sehingga rentan terhadap penyakit. Sedangkan pada aspek sosial, lansia dianggap sebagai seseorang yang kurang produktif lagi. Dan aspek ekonomi, lansia yang dianggap sudah tidak produktif maka sudah tidak bisa mendapat penghasilan sendiri. Menurut Aru (2009), lanjut usia dapat diartikan sebagai kelemahan, penurunan, meningkatnya sensibilitas terhadap penyakit dan perubahan lingkungan, hilangnya sistem gerak dan ketangkasan, serta perubahan fisiologis yang terkait dengan usia.

Secara global, populasi lanjut usia terus mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya. Berdasarkan data United Nations (2023), pada tahun 2000 jumlah lansia didunia berjumlah 424,5 juta jiwa, kemudian meningkat pada tahun 2010 menjadi 493,9 juta jiwa, dan pada tahun 2020 meningkat lagi sebanyak 727 juta jiwa. Berdasarkan peningkatan jumlah lansia ini, United Nations memproyeksikan pemerataan secara keseluruhan jumlah lanjut usia pada tahun 2025 serta

memproyeksikan kenaikan jumlah lansia yang mencapai dua miliar jiwa pada tahun 2050. Sebagaimana dengan gambaran proyeksi presentase populasi penduduk lansia di dunia pada tahun 2050 berikut ini :



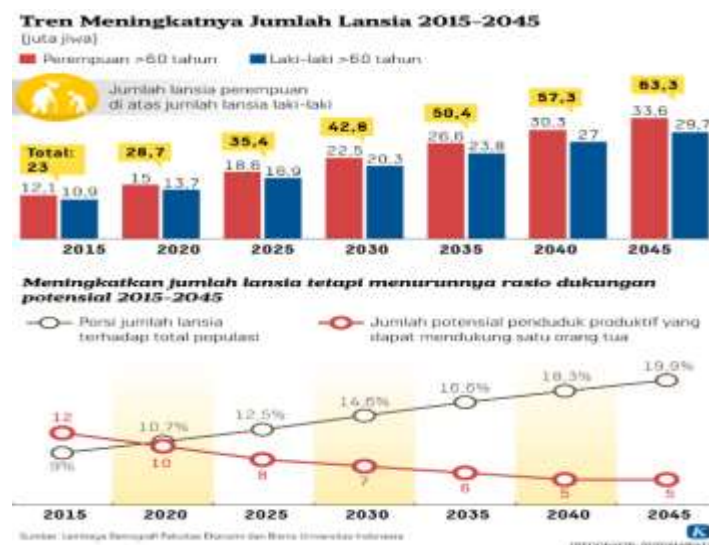
Gambar 1.1 Proyeksi Presentase Populasi Penduduk Lansia di Dunia Pada Tahun 2050

Sumber : interaktif.tempo.co

<https://interaktif.tempo.co/artikel/show/menghadapi-penuaan-populasi> (Diakses 8 September 2023)

Negara Indonesia sebagai salah satu negara yang saat ini masih berkembang dan memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Indonesia memiliki jumlah penduduk sebanyak 275,773,8 jiwa dengan cakupan persentase penduduk lanjut usia 10,48% pada tahun 2022 (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2022). Menurut UNICEF (2007), Indonesia adalah negara yang sudah memasuki era penduduk berstruktur lanjut usia (*aging structured*), serta hasil survei United Nation International Children Found (UNICEF) yang menyatakan bahwa pertambahan jumlah penduduk lansia di Indonesia dalam jangka waktu tahun 1990 – 2025 tergolong tercepat di dunia (UNICEF, 2007). Dalam indikator tingkat utama pada kesehatan masyarakat, salah satunya adalah meningkatnya

usia harapan hidup yang berarti semakin bertambah dan semakin banyak penduduk lanjut usia. Mengingat, sampai saat ini penduduk lansia dapat dikatakan kurang mendapatkan perhatian yang serius dalam hal pemenuhan gizi mereka. Jumlah Lanjut usia sejak tahun 2015 hingga 2045 diproyeksikan terus mengalami peningkatan menurut tren meningkatnya jumlah lansia di bawah ini :



Gambar 1.2 Tren Meningkatnya Jumlah Lansia Tahun 2015-2045 di Indonesia

Sumber : Kompas.id

<https://www.kompas.id/baca/dikbud/2022/02/07/rentan-terpapar-hoaks-literasi-digital-lansia-perlu-ditingkatkan> (Diakses 8 September 2023)

Pada masyarakat lanjut usia lazimnya akan mengalami penurunan mobilitas, emosional, ingat, kesehatan, fisik, serta cara interaksi sosial. Di usia yang tidak produktif, masyarakat lansia akan sulit dalam mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupannya. Lansia dapat dikatakan telah mencapai kehidupan sejahtera apabila mereka memiliki kualitas hidup yang baik dan berada pada kondisi lansia menikmati masa terakhir dalam kehidupannya (Wulandari dan Irfan, 2023). Dalam hal ini, kesejahteraan dianggap sebagai kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan pada

kehidupan. Dikutip dari Suud (2006) menurut Segal dan Brzuzy, kesejahteraan sosial merupakan kondisi sejahtera dari masyarakat meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan, dan kualitas hidup rakyat. Dalam hal ini, setiap manusia memiliki hak untuk memperoleh kesejahteraan di dalam kehidupannya. Akan tetapi, tidak semua manusia dapat memperoleh kesejahteraan hidupnya yang mana diakibatkan dengan adanya keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Keterbatasan tersebut mengakibatkan masih adanya masyarakat yang tidak memperoleh kesejahteraan atau disebut sebagai masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) (Susanti,2020).

Permasalahan kesejahteraan sosial tentunya terjadi di setiap negara, termasuk negara Indonesia. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan suatu individu yang memiliki hambatan dalam pemenuhan kebutuhan dasar hidupnya, keterbatasan ini menyebabkan suatu individu tersebut tidak mampu melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik (Nurhaeni,2020). Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial didominasi oleh masyarakat miskin yang memiliki permasalahan dalam kehidupan bermasyarakatnya salah satu kategorinya yakni lanjut usia miskin. Terdapat beberapa masalah sosial yang menjadi isu dan perhatian penting pada masyarakat yang membutuhkan pengendalian dan penyelesaian melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada masyarakat, yang salah satunya permasalahan memberikan kelayakan dan pelayanan kepada penyandang permasalahan kesejahteraan lanjut usia miskin. Rentannya terjadi permasalahan kesejahteraan sosial lanjut usia pada penduduk lanjut usia maka diperlukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan sebagai upaya

dalam menuntaskan permasalahan yang terjadi khususnya bagi masyarakat lanjut usia. Sehingga keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial akan mengurangi jumlah masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial terutama penyandang masalah kesejahteraan sosial lanjut usia.

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemerintah menciptakan kebijakan melalui program yang didasarkan oleh kebutuhan maupun kepentingan bagi masyarakat. Untuk itu, upaya Pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan kesejahteraan khususnya pada masyarakat lanjut usia diatur Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia diarahkan agar masyarakat lanjut usia dapat tetap diselenggarakan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial dengan melalui pemenuhan hak salah satunya pada bentuk memberikan bantuan sosial. Maka dari itu, Undang-Undang tersebut digunakan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan kesejahteraan masyarakat lanjut usia di setiap daerah agar masyarakat lanjut usia memperoleh hak yang sama dalam hal kesejahteraan sosial yang salah satunya pada kesejahteraan masyarakat di Kota Surabaya.

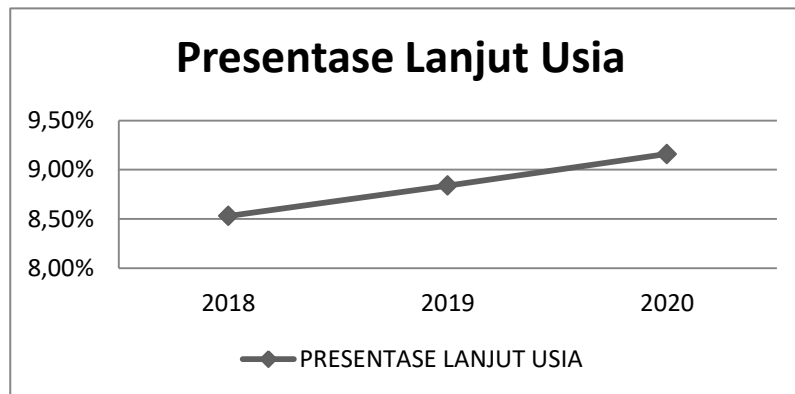
Tabel 1.1 Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019

Kota	Lansia	Anak Terlantar	Anak Korban Kekerasan	Anak Disabilitas	Anak Jalanan
Kediri	400	59	11	153	18
Blitar	348	237	2	90	15
Malang	166	2	3	544	108
Probolinggo	261	284	24	-	-
Mojokerto	1.446	120	-	50	6

Surabaya	15.354	6.349	-	242	59
Pasuruan	619	27	-	34	28
Madiun	814	282	1	157	3
Batu	-	-	10	-	-
Total	19.408	7.360	51	1.270	237

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, 2019

Berdasarkan data diatas, Kota Surabaya menjadi kota yang memiliki jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial lansia yang tertinggi dibandingkan dengan kota lain di Jawa Timur yakni sebanyak 15.354 jiwa. Kota Surabaya menjadi kota terbesar kedua di Indonesia yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi yakni dengan jumlah sebanyak 2.972.801 jiwa (Disdukcapil Kota Surabaya, 2023). Dengan jumlah populasi penduduk sebanyak itu tentunya diikuti dengan peningkatan jumlah lansia, sehingga Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya dalam mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial khususnya kesejahteraan sosial lanjut usia di Kota Surabaya sendiri. Dalam berbagai permasalahan yang dihadapi oleh lanjut usia, maka penting bagi Negara Indonesia melalui Pemerintah Indonesia bersama Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya sesuai tujuan Negara Republik Indonesia untuk memberikan kehidupan yang layak secara menyeluruh hingga mendapatkan kesejahteraan umum bagi rakyatnya tanpa perkecualian. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam perwujudan cita-cita bangsa yang bisa diwujudkan dengan memajukan kesejahteraan seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali (Sinaga, et.al, 2018).



Gambar 1.3 Presentase Lanjut Usia di Kota Surabaya Tahun 2018-2020
 Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, 2020

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur diatas menunjukkan presentase jumlah penduduk lanjut usia di Kota Surabaya sejak tahun 2018 berada di angka 8,53%, pada tahun 2019 meningkat di angka 8,84%, kemudian pada tahun 2020 meningkat lagi di angka 9,16%. Jumlah lanjut usia yang terus meningkat setiap tahunnya tentunya menimbulkan suatu konsekuensi yang cukup kompleks. Maka dari itu, persoalan peningkatan jumlah lanjut usia menjadikan Pemerintah Kota Surabaya untuk terus berupaya dalam melindungi lanjut usia yang dapat dikatakan sudah tidak produktif sehingga rentan terjadi permasalahan kesejahteraan sosial lanjut usia. Kesejahteraan dapat diukur dari kesehatan, keadaan ekonomi, yang berlaku kepada individu, keluarga, kelompok masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat (Midgley, 1995) dalam (Setiawan, 2017).

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kota Surabaya melakukan upaya mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial lanjut usia melalui Program Permakanan bagi lanjut usia. Program Permakanan merupakan program yang dibuat oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan melalui makanan secara bergizi

dan sehat setiap hari satu kali kepada lanjut usia dengan tujuan meringankan kebutuhan dasar pangan bagi lansia miskin. Program Permakanan ini merupakan satu-satunya program kebutuhan dasar pangan di Indonesia yang ada dan terimplementasikan di Kota Surabaya. Tujuan diadakannya Program Permakanan tersebut untuk membantu masyarakat kurang mampu yang membutuhkan peranan Pemerintah Kota Surabaya dalam hal makanan dan pemenuhan gizi. Program ini dijalankan dengan melibatkan berbagai pihak selain Pemerintah Kota Surabaya yang diantaranya adalah Dinas Sosial, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan, Dinas Kesejahteraan Rakyat, Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Lurah, Camat, Karang Werda, Pihak pengantar makanan dan juga *catering*.

Program Permakanan ditetapkan di Kota Surabaya sejak bulan November tahun 2012 yakni pada saat kepemimpinan Walikota Tri Rismaharini yang mana dilatar belakangi oleh banyaknya kasus orang terlantar yang meninggal karena kelaparan (Supratini, 2018). Dalam pelaksanaannya, dirumuskan suatu peraturan yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Program Permakanan agar tujuan dari Program Permakanan dapat tercapai. Namun, seiring berjalannya waktu Program Permakanan terus mengalami pembaharuan sasaran demi kesejahteraan masyarakat dalam hal pemenuhan gizi, yang diantaranya Program Permakanan dimulai bagi lanjut usia dengan diterbitkannya Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pendoman Pemberian Makanan Bagi Lansia yang menyebutkan bahwa sasaran dalam Program Permakanan adalah lanjut usia

miskin dan terlantar saja. Selanjutnya pada tahun 2013 adanya pembaruan dengan diterbitkannya Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Lanjut Usia Sangat Miskin dan Lanjut Usia Terlantar yang menyebutkan sasaran program ini adalah lanjut usia sangat miskin dan terlantar. Selanjutnya, pada tahun 2016 diterbitkannya Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Permakanan Di Kota Surabaya yang mana terdapat penambahan sasaran penerima bantuan yakni bagi anak yang usianya belum mencapai delapan belas tahun yang orangtuanya telah meninggal yatim/piatu yang diatur dalam. Dan yang terakhir pada tahun 2022, terdapat pembaharuan yakni diterbitkannya Peraturan Walikota Surabaya Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Permakanan yang menyebutkan sasaran Program Permakanan diperuntukan bagi lanjut usia enam puluh tahun atau lebih, anak yatim, piatu atau yatim piatu dengan umur dibawah delapan belas tahun yang ditinggalkan salah satu atau kedua orangtua kandungnya, dan penyandang disabilitas yang terdaftar dalam keluarga miskin di Kota Surabaya. Dari adanya pembaharuan peraturan pada Program Permakanan menunjukkan bahwa sasaran penerima Program Permakanan menjadi lebih menyeluruh dimana Pemerintah Kota Surabaya lebih mengedepankan kesejahteraan seluruh masyarakat di Kota Surabaya.

Agar pelaksanaan Program Permakanan tepat sasaran, Pemerintah Kota Surabaya terus melakukan observasi dan pendataan langsung di lapangan. Jika terdapat penemuan baru, Pemerintah Kota Surabaya bersama Dinas Sosial melalui Satuan Tugas Dinas Sosial segera melakukan observasi langsung ke lapangan lalu

melakukan pendataan kuota yang tersedia. Salah satu data baru harus berdomisili Surabaya dan bisa masuk menggantikan jika salah satu penerima sebelumnya meninggal dunia (Ananto Pradana, 2023). Selain itu, pengelolaan pelaksanaan Program Permakanan dalam hal anggaran ditangani langsung oleh Dinas sosial dan bukan lagi berasal dari dana Kelurahan sebagai belanja Program Permakanan. Demi mempermudah pendataan dan monitoring penerima Program Permakanan, Pemerintah Kota Surabaya berinovasi membuat Aplikasi Permakanan di Kota Surabaya. Seperti yang tertulis dalam artikel jatim.ataranews.com:

Jatim.ataranews.com (19 Januari 2023) – Program Permakanan tahun ini tidak lagi berada di Kelurahan, namun sudah ditangani oleh Dinsos sebagai bantuan sosial. Sehingga, anggaran permakanan tahun 2023 ini berasal dari anggaran Dinsos. Setelah dilakukan pendataan dan melalui proses verifikasi yang cukup panjang, Pemerintah Kota Surabaya akhirnya menetapkan penerima bantuan Program Permakanan sebanyak 18.818 jiwa. Pemerintah Kota Surabaya juga telah membuat aplikasi Permakanan Surabaya agar mempermudah dalam monitoring Program Permakanan ini. <https://www.surabaya.go.id/id/berita/72029/tetapkan-18818-penerima-pemkot-surabaya-juga-luncurkan-aplikasi-permakanan-permudah-monitoring> (Diakses pada tanggal 6 Januari 2024).

Pada hal penyediaan dan pendistribusian makanan, Pemerintah Kota Surabaya menyerahkan hal tersebut pada *catering* daerah setempat dan para lansia penerima Program Permakanan ini menerima makanan seharga Rp.11.000 per hari. Harga itu dinaikan dari tahun-tahun sebelumnya yang hanya Rp.10.000 per hari dan dipotong PPh 2% sehingga hanya mendapat per porsi Rp. 9.800. Pihak *catering* menyiapkan makanan dengan porsi 4 sehat 5 sempurna sesuai menu yang sudah terjadwal setiap harinya oleh Dinas Sosial dan dikemas dengan tepak makan yang layak dan sehat untuk makanan seperti gambar berikut ini:



Gambar 1.4 Hidangan Program Permakanan

Sumber: kkrnews.com

(<https://www.kkrnews.com/program-permakanan-pemkot-surabaya-untuk-ekonomi/> diakses pada tanggal 8 September 2023)

Dalam pelaksanaannya, Program Permakanan ini disalurkan ke 154 Kelurahan yang tersebar di 29 Kecamatan yang ada di Kota Surabaya. Jumlah penerima Program Permakanan Per Kecamatan di Kota Surabaya berbeda setiap daerahnya. Adapun data penerima Program Permakanan tiap Kecamatan di Kota Surabaya tahun 2019 – 2021 sebagai berikut :

Tabel 1.2 Data Penerima Program Permakanan Per Kecamatan Di Kota Surabaya Tahun 2019 - 2021

No.	Kecamatan	Jumlah Penerima Manfaat		
		2019	2020	2021
1.	Asemrowo	566	590	591
2.	Benowo	628	642	608
3.	Bubutan	1.288	1.275	1.281
4.	Bulak	719	746	686
5.	Dukuh Pakis	399	403	383
6.	Gayungan	340	353	327
7.	Genteng	1.044	1.051	1.051
8.	Gubeng	881	950	941
9.	Gunung Anyar	507	507	508
10.	Jambangan	547	565	556
11.	Karang Pilang	430	435	431
12.	Kenjeran	1.141	1.106	1.145
13.	Krembangan	1.200	1.183	1.144
14.	Lakarsantri	1.003	1.011	980
15.	Mulyorejo	692	724	718

16.	Rungkut	871	904	908
17.	Sambikerep	433	435	468
18.	Sawahan	1.780	1.848	1.767
19.	Semampir	1.864	1.779	1.852
20.	Simokerto	1.560	1.571	1.463
21.	Sukolilo	910	931	899
22.	Sukomanunggal	800	808	776
23.	Tambaksari	2.232	2.138	2.089
24.	Tandes	950	978	925
25.	Tegalsari	1.263	1.261	1.272
26.	Tenggilis Mejoyo	678	664	652
27.	Wiyung	717	733	714
28.	Wonocolo	703	680	682
29.	Wonokromo	1.731	1.721	1.685
Total		29.528	29.667	29.312

Sumber: Dinas Sosial Kota Surabaya, 2021

Berdasarkan data diatas, jumlah penerima Program Permakanan pada tahun 2019 sebanyak 29.528 jiwa, pada tahun 2020 sebanyak 29.667 jiwa, dan pada tahun 2021 sebanyak 29.312 jiwa. Data tersebut menunjukkan bahwa terjadi kenaikan dan penurunan penerima Program Permakanan berdasarkan jumlah lansia yang berada di setiap Kecamatan Kota Surabaya dan terdaftar dalam lansia miskin oleh Dinas Sosial Kota Surabaya.

Program Permakanan sampai saat ini sudah berjalan selama sebelas tahun sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2012. Berjalannya Program Permakanan masih seringkali ditemukan beberapa permasalahan seperti halnya daftar menu makanan yang disiapkan Dinas Sosial masih belum mempertimbangkan kondisi penerima manfaat, tidak adanya kordinasi dengan ahli gizi, dinas kesehatan, dan puskesmas setempat, serta permasalahan belum adanya pembaharuan kotak makan sesuai standar kesehatan yang dilakukan secara berkala demi menjaga kualitas makanan serta gizi lansia (Syaputri, 2020). Tidak hanya itu saja, penggunaan waktu pada proses pemberian permakanan belum

sesuai dengan waktu yang ditetapkan dan masih seringkali terjadi keterlambatan pada pengiriman makanan (Kartika, R.R. dan Hardjati S., 2022). Adanya berbagai permasalahan dalam pelaksanaan Program Permakanan, Pemerintah Kota Surabaya merencanakan Program Permakanan untuk dialihkan menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Permakanan pada tahun 2024 sebesar Rp. 200.000 per bulannya. Sebagaimana dilansir dari berita surabaya.go.id

Surabaya.go.id (5 Januari 2024) – BLT permakanan sebesar Rp. 200.000 akan diberikan setiap bulannya. BLT permakanan merupakan peralihan dari Program Permakanan di tahun 2023, yang kini disalurkan secara tunai. <https://www.surabaya.go.id/id/berita/78002/pemkot-surabaya-mulai-salurkan-blt-permakanan-rp-200-ribu> (Diakses pada tanggal 6 Januari 2024).

Peralihan Program Permakanan ini sebagai bentuk upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada dalam pelaksanaan Program Permakanan. Program Permakanan yang sebelumnya disalurkan berupa makanan siap saji, kini disalurkan secara tunai. Pada tahun 2024, sampai dengan bulan Januari penyaluran BLT Permakanan belum secara menyeluruh tersalurkan di 31 Kecamatan Kota Surabaya. Salah satu Kecamatan penerima Program Permakanan yakni Kecamatan Jambangan. Kecamatan Jambangan memiliki 4 Kelurahan yakni Kelurahan Kebonsari, Kelurahan Pagesangan, Kelurahan Jambangan, dan Kelurahan Pagesangan. Berdasarkan arsip Kecamatan Jambangan tahun 2023, jumlah lansia yang terdaftar pada keluarga miskin sebanyak 1.716 jiwa. Akan tetapi, jumlah tersebut berbeda dengan jumlah lansia miskin penerima Program Permakanan di Kecamatan Jambangan, sebagaimana dibuktikan dengan data berikut :

Tabel 1.3 Jumlah Lansia Miskin Penerima Program Permakanan Kecamatan Jambangan

Kelurahan	Jumlah Lansia Penerima
Jambangan	35
Kebonsari	112
Pagesangan	90
Karah	42
Total	279

Sumber : Arsip Kecamatan Jambangan, 2023

Berdasarkan data yang disajikan diatas, pada tahun 2023 Kecamatan Jambangan memiliki total penerima Program Permakanan sebanyak 279 jiwa dan Kelurahan Kebonsari menjadi salah satu Kelurahan di Kecamatan Jambangan yang memiliki jumlah lansia penerima manfaat Program Permakanan paling banyak. Pada Kelurahan Kebonsari, jumlah lansia penerima manfaat Program Permakanan sebanyak 112 jiwa. Hal tersebut menjadi yang paling banyak diantara Kelurahan lain di Kecamatan Jambangan yakni Kelurahan Jambangan sebanyak 35 jiwa, Kelurahan Pagesangan sebanyak 90 jiwa, serta Kelurahan Karah sebanyak 42 jiwa.

Kelurahan Kebonsari memiliki jumlah lansia Program Permakanan paling banyak dikarenakan jumlah lansia di wilayah Kelurahan Kebonsari sebanyak 1.297 jiwa (Kelurahan Kebonsari, 2023). Untuk menyalurkan Program Permakanan sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan, Kelurahan Kebonsari memiliki wadah pembinaan dan pemberdayaan bagi lanjut usia yakni Karang Werdha Wiguna Karya. Karang Werdha Wiguna Karya memiliki tugas melaksanakan dan mengkoordinir secara langsung pemberian permakanan untuk dibagikan setiap pagi kepada 112 lansia miskin.

Program ini menarik untuk dianalisis dikarenakan perlunya mensejahterkan kehidupan sosial yang sesuai dengan amanat dalam Dasar Negara Indonesia yang menyelenggarakan dan mengusahakan kesejahteraan bagi rakyatnya secara adil dan merata. Sebagai upaya penyelesaian permasalahan kesejahteraan sosial terutama pada permasalahan sosial lanjut usia, Pemerintah Kota Surabaya bersama Dinas Sosial serta para *stakeholders* yang terlibat membuat salah satu langkah solutif melalui Program Permakanan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial lansia miskin berupa bantuan pangan yang dibagikan setiap pagi pada setiap harinya. Hal tersebut sebagai bentuk harapan perwujudan kesejahteraan masyarakat dengan meringankan kebutuhan pangan penyandang permasalahan kesejahteraan sosial lansia miskin. Keberhasilan pada tujuan dari program yang dijalankan diukur pada keefektifan suatu program. Efektivitas merujuk pada keberhasilan pencapaian sasaran serta tujuan dari organisasi sebagai tolak ukur kebenaran suatu program dijalankan (Silalahi, 2011).

Berdasarkan observasi awal, penulis menemukan adanya permasalahan penerima yang tidak cocok dengan lauk yang diberikan sehingga hanya diterima lalu dibuang pada saat sore hari. Permasalahan lainnya yaitu harga makanan perkotak dirasa kurang untuk kebutuhan lansia serta menu makanan yang kurang variatif sehingga lanjut usia miskin penerima Program Permakanan sering merasa bosan. Dengan adanya permasalahan itu, menjadikan tantangan tersendiri bagi pelaksana Program Permakanan bagi lanjut usia miskin di Kelurahan Kebonsari. Dalam hal ini, pelaksana Program Permakanan memiliki peran penting dalam menjalankan pelaksanaan proses Program Permakanan dengan melayani dan

mewujudkan tujuan yang sudah ditentukan yakni yang bertujuan kesejahteraan masyarakat dengan meringankan kebutuhan pangan penyandang permasalahan kesejahteraan sosial lansia miskin.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan dan diuraikan diatas maka peneliti melakukan penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis sejauh mana efektivitas Program Permakanan bagi lanjut usia miskin di Kelurahan Kebonsari Kecamatan Jambangan Kota Surabaya melalui pengukuran efektivitas program menurut Campbell J.P. (Mutiarin dan Arif, 2014) yakni : keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, dan pencapaian tujuan menyeluruh. Maka, peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Program Permakanan Bagi Lanjut Usia Miskin Di Kelurahan Kebonsari Kecamatan Jambangan Kota Surabaya”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian yang sedang diteliti yaitu : “Bagaimana Efektivitas Program Permakanan Bagi Lanjut Usia Miskin Di Kelurahan Kebonsari Kecamatan Jambangan Kota Surabaya?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas Program Permakanan bagi lanjut usia miskin di Kelurahan Kebonsari Kecamatan Jambangan Kota Surabaya

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu dapat dilaksanakannya penelitian kepada berbagai pihak, baik manfaat bagi penulis maupun pihak lainnya yang terlibat, juga bagi pihak akademis dan masyarakat umum dalam mengetahui efektivitas Program Permakanan bagi lanjut usia miskin di Kelurahan Kebonsari Kecamatan Jambangan Kota Surabaya

1. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan secara teori yang berkaitan dengan efektivitas Program Permakanan bagi lanjut usia miskin di Kelurahan Kebonsari Kecamatan Jambangan Kota Surabaya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan manfaat bagi peneliti dalam mengkaji pengetahuan dan teori yang diperoleh pada bangku perkuliahan serta sebagai syarat kelulusan dan memperoleh gelar serjana pada program studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

b. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Sebagai kebaruaran penilitian yang digunakan nantinya sebagai bahan referensi atau acuan dan sumber bacaan di perpustakaan sehingga dapat digunakan sebagai dasar pemikiran bagi penelitian sejenis selanjutnya.

c. Bagi Dinas Sosial Kota Surabaya

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan referensi dan sumbangsih pemikiran serta saran bagi Dinas Sosial Kota Surabaya dan Kelurahan Kebonsari Kecamatan Jambangan sebagai bahan rujukan dan tolak ukur keberhasilan Program Permakanan Bagi Lanjut Usia Miskin Di Kelurahan Kebonsari Kecamatan Jambangan Kota Surabaya hingga seluruh Kelurahan dan Kecamatan di Kota Surabaya.